



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu.

Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan guna menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, serta sanggup menjawab tuntutan transformasi secara efisien serta efektif sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sehingga kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Bapperida sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah tentunya wajib menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang didalamnya memberikan gambaran mengenai penyelenggaraan urusan penunjang yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun anggaran 2025.

Semoga dengan adanya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi dari berbagai pihak guna penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan.

Walaikum salam, WR, WB

Benteng, Januari 2026

KEPALA BAPPERIDA,

Dr. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19840104 200903 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Gambaran Umum OPD.....	1
1.3. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.4. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural.....	8
1.5. Inovasi	10
1.6. Penghargaan.....	10
1.7. Realisasi Keuangan.....	11
BAB II. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	12
2.1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	12
2.1.1 Penunjang Bidang Perencanaan.....	12
2.1.2 Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan.....	13
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN.....	14
3.1. Dasar Hukum.....	14
3.2. Gambaran Umum Tugas Pembantuan dan Penugasan.....	14
3.3. Capaian Pelaksanaan Tugas Pembantaun dan Penugasan.....	14
3.4. Hambatan – Hambatan	
BAB IV PENUTUP.....	15
Lampiran.....	16

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Berdasarkan
Jenjang Pendidikan Tahun 2025 8

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Golongan /
Ruang Tahun 2025 9

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Tahun 2025 9

Tabel 1.4. Target Belanja Bapperida APBD Perubahan
Tahun Anggaran 2025 11

Tabel 2.1. Capaian Kinerja IKK Fungsi Penunjang Urusan
Pemerintahan Bidang Perencanaan 12

Tabel 2.2. Capaian Kinerja IKK Fungsi Penunjang Urusan
Pemerintahan Bidang Penelitian dan
Pengembangan 13

Tabel 3.1. Daftar Pelaksanaan Tugas Pembantuan 14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bapperida Kepulauan
Selayar. 3

Gambar 1.2 Tampilan Website e-monev.com 10

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan sepanjang 1 (satu) tahun anggaran. LPPD ialah salah satu laporan yang disusun serta di informasikan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Permendagri No 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, segala informasi serta data yang dimasukkan ke dalam LPPD disusun bersumber pada prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi serta objektif.

I.2. Gambaran Umum

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, disebutkan bahwa Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan Organisasi Perangkat Daerah bertipe A yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan yang menjadi kewenangan daerah, dimana, salah satunya adalah melakukan perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Perumusan rencana strategis tersebut dilaksanakan untuk memastikan bahwa visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud selama periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, beralamat di jalan Jend. Achmad Yani No. 1 Benteng, Kode Pos 92812, website : <https://bapperida.kepulauanselayarkab.go.id/> Email : bapperidaselayar@gmail.com dengan titik koordinat X -6,120087 dan Y 120.466638.

I.3. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, disebutkan bahwa Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, riset dan inovasi daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bapperida mempunyai fungsi:

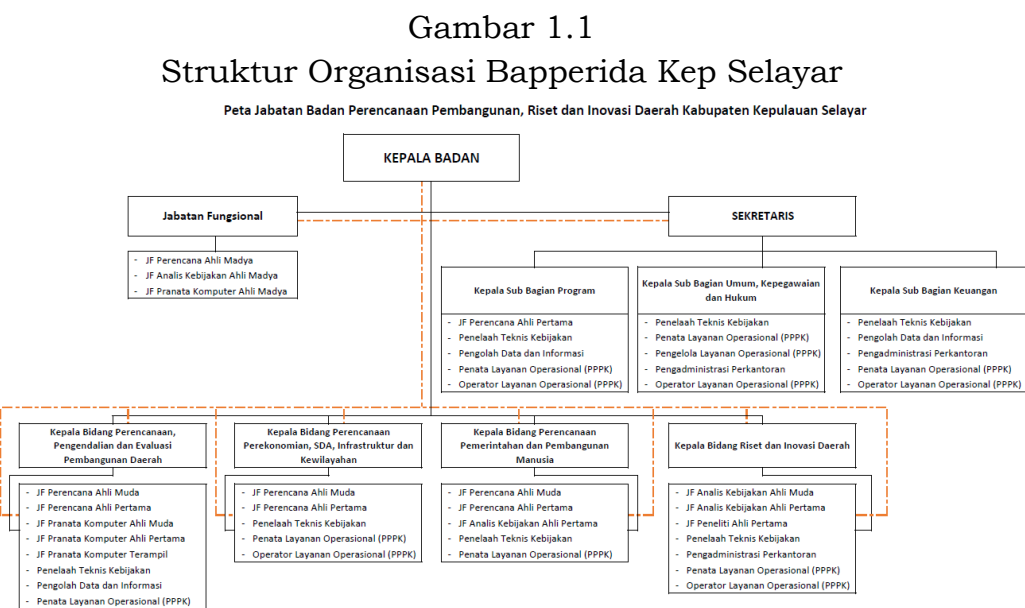
- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, pengkajian penerapan invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- c. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di daerah serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;

- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan, terdiri atas:
4. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas:
5. Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas:
6. Bidang Riset dan Inovasi Daerah, terdiri atas:
7. Kelompok Jabatan Fungsional
 - a. Perencana Ahli;
 - b. Analis Kebijakan Ahli; dan
 - c. Peneliti Ahli.

Struktur organisasi Bapperida digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut:



Struktur Organisasi Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar No 44 Tahun 2024

Uraian tugas dan fungsi Kepala Bapperida, Sekretaris, Kepala Bidang dengan Sub bagian sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut:

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, pengkajian penerapan invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - c. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di daerah serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - d. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah; dan
- (2) Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan

kegiatan dan memberikan pelayanan teknis maupun administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris melaksanakan fungsi:

- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;
- b. pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
- c. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat sebagaimana dimaksud diatas membawahi :

- a. Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja;
- b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian dan peraturan perundang-undangan;
- c. Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan.

(3) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;

- c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang perencanaan, pengendalian dan pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

(4) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

(5) Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perencanaan bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi perencanaan di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Bidang Riset dan Inovasi Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang riset dan inovasi daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang riset dan inovasi daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang riset dan inovasi daerah;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi di bidang riset dan inovasi daerah;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang riset dan inovasi daerah;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang riset dan inovasi daerah;
 - f. Pelaksanaan administrasi di bidang penelitian dan pengembangan daerah; dan
 - g. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

I.4. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural

Berdasarkan data kepegawaian Bapperda Kepulauan Selayar per Desember 2025 terdiri atas Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 29 orang dan pegawai yang bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (pegawai Non ASN) sebanyak 31 orang, Sehingga jumlah total pegawai ASN dan Non ASN pada Bapperda Kepulauan Selayar adalah sebanyak 60 pegawai.

Jumlah dan komposisi pegawai ASN dan Non ASN pada Bapperda Kepulauan Selayar Tahun 2025 berdasarkan jenjang pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut.

Tabel. I.1.
Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Berdasarkan
Jenjang Pendidikan Tahun 2025

No	Jenjang Pendidikan	ASN			Non ASN		
		Jumlah Pegawai	Persentase Terhadap ASN	Persentase Terhadap Seluruh Pegawai	Jumlah Pegawai	Persentase Terhadap Non ASN	Persentase Terhadap Seluruh Pegawai
	Perguruan Tinggi	25	86,21 %	41,67 %	23	77,42 %	40 %
1	S3	2	6,90 %	3,33 %	-	-	-
2	S2	10	34,48 %	16,67 %	-	-	-
3	S1	13	44,83 %	21,67 %	23	74 ,19 %	38,33 %
4	D3	0	0 %	0 %	1	3,23 %	1,67 %
	Bukan Perguruan Tinggi	4	13,79 %	6,67 %	7	22,58 %	11,67 %
1	SMA	4	13,79 %	6,67 %	6	19,35 %	10 %
2	SMP	-	-	-	1	3,23 %	1,67 %
Jumlah		29			31		
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN dan Non ASN)		60					

Sumber : Bapperda Kepulauan Selayar 2025

Selanjutnya untuk pegawai ASN bila dilihat dari golongan / ruang, dari 29 pegawai yang termasuk dalam golongan IV sebanyak 9 pegawai (31%), golongan III sebanyak 18 pegawai (62%), dan golongan II sebanyak 2 pegawai (7%), dimana secara detail dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut :

Tabel. I.2.
Jumlah ASN Berdasarkan Golongan / Ruang Tahun 2025

No	Golongan / Ruang	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
1.	Golongan IV	9	31%
	IV/c	1	3%
	IV/a	8	28%
2.	Golongan III	18	62%
	III / d	8	28%
	III / c	3	10%
	III / b	4	14%
	III / a	3	10%
3.	Golongan II	2	7%
	II / d	0	0%
	II / c	2	7%
	II / b	0	0%
Jumlah		29	100%

Sumber : Bapperida Kepulauan Selayar 2025

Dari sisi kedudukan dalam organisasi, dari 29 pegawai ASN terdapat 1 pegawai (3,45 %) yang menduduki eselon II, 5 pegawai (17,24%) yang menduduki eselon III, 2 pegawai (6,90%) yang menduduki eselon IV, 10 pegawai (34,48 %) yang termasuk dalam kelompok jabatan fungsional tertentu, serta 11 pegawai (37,93 %) yang termasuk dalam jabatan fungsional umum, dimana secara detail dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut.

Tabel. I.3.
Jumlah, Pegawai ASN yang Menduduki Jabatan Tahun 2025

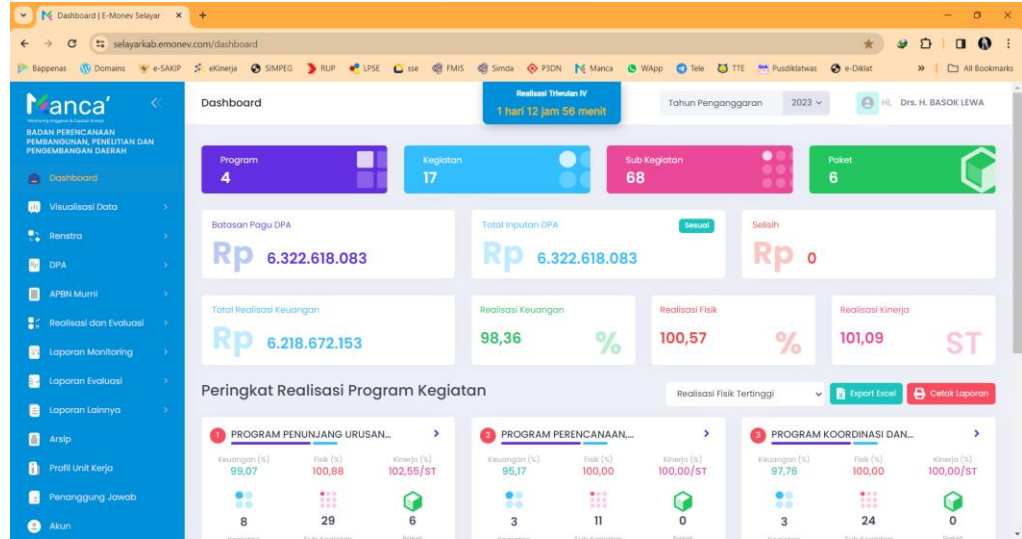
No	Jabatan	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
1	Eselon II	1	3,45 %
2	Eselon III	5	17,24 %
3	Eselon IV	2	6,90 %
4	Jabatan Fungsonal Tertentu	10	34,48 %
5	Jabatan Fungsonal Umum	11	37,93 %
Jumlah		29	100%

Sumber : Bapperida Kepulauan Selayar 2025

I.5. Inovasi

Perkembangan sistem informasi dan teknologi menuntut Pemerintah agar dapat memberikan pelayanan publik secara cepat, tepat, mudah di akses dan berbiaya murah, untuk itu pada tahun 2024 Bapperida Kepulauan Selayar membuat inovasi sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Terpadu, yang berisi database program kegiatan dan sub kegiatan serta realisasi kinerja dan keuangan per tahun anggaran perencanaan, data tersebut direkap dalam bentuk website sehingga dapat dengan mudah di akses oleh para pengambil kebijakan. Tujuannya adalah meyediakan data capaian realisasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan serta realisasi anggaran yang dapat akses secara internal di lingkungan OPD terkait.

Gambar 1.2
Tampilan Website <https://selayarkab.emonev.com>



Manfaat integrasi dari aplikasi monitoring dan evaluasi antara lain : 1) organisasi dapat meningkatkan efektivitas, mengurangi risiko, dan mencapai hasil yang lebih baik dalam pencapaian kinerja program/kegiatan dan sub kegiatan, 2) Memberikan informasi yang diperlukan bagi pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan strategis, 3) Memberikan informasi dasar untuk evaluasi berkelanjutan dan perbaikan berkelanjutan dalam perencanaan dan penganggaran.

I.6. Penghargaan

Pada tahun 2025, Bapperida Kepulauan Selayar menerima Penghargaan Top 5 Integrated Sustainability Indonesia Movement 2025 (I-SIM) dalam rangka Indonesia’s SDGs Action Award 2025 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) pada tanggal 17 November 2025 bertempat di

Aula Lantai 4, Graha Surveyor Indonesia, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 56, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

I.7. Realisasi Keuangan

Anggaran menjadi faktor pendukung dan berpengaruh dalam rangka mencapai indikator keberhasilan. Program dan kegiatan juga dapat dilaksanakan dengan dukungan anggaran yang memadai, dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan target belanja setelah APBD perubahan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.6.036.201.400,- dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 1.4
Target belanja Bapperida APBD Perubahan
Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	target	Persentase
1	Belanja Operasi	Rp.5.916.343.300	98.01%
1.1	Gaji Pokok PNS	Rp. 3.391.999.300	56,19%
1.2	Belanja Barang Jasa	Rp. 2.524.344.000	41,82%
2	Belanja Modal	Rp. 119.858.100	1,99%
2.1	Belanja Modal Mebel	Rp. 9.266.000	0,15%
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 66.500.000	1,10%
2.3	Belanja Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 44.092.100	0,73%

- A. Belanja Operasi
Belanja Operasional Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp.5.916.343.300,- dan terealisasi sebesar Rp.5.712.081.285,- atau 97%.
- B. Belanja Modal
Belanja Modal Tahun 2025, dianggarkan sebesar Rp.119.858.100,- dan terealisasi sebesar Rp.102.069.349,- atau 85%

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan perturan perundang-undangan tentang pemerintah daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing – masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan, serta inovasi daerah. Keberadaan BAPPERIDA memiliki peran strategis dalam memastikan arah pembangunan daerah berjalan terencana, terukur, sistematis, dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi kepala daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara substantif, BAPPERIDA mengampu urusan fungsi penunjang perencanaan sebagaimana diatur dalam ketentuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

2.1.1 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan
Pemerintahan Bidang Perencanaan

No.	IKK	Elemen Data	Capaian Kinerja	Ket.
1	Persentase Kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Program dan atau kegiatan yang dianggarkan dalam peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan direalisasikan = 263 Program	100 %	
		Program kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan 17 program prioritas presiden = 263 Program		

2.1.2 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan

Tabel 2.2
 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan

No.	IKK	Elemen Data	Capaian Kinerja	Ket.
1	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan Kabupaten Kepulauan Selayar untuk IGA Tahun 2025	Produk inovasi perangkat daerah yang menjadi bagian program dan atau kegiatan = 11 produk inovasi	100 %	
		Produk inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah = 11 produk inovasi		

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN
TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

3.1. Dasar Hukum

-

3.2. Gambaran Umum Tugas Pembantuan dan Penugasan

-

3.3. Capaian Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan

Tabel 3.1
Daftar Pelaksanaan Tugas Pembantuan

No	Perangkat Daerah	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (Rp)
	NIHIL				

3.4. Hambatan / Permasalahan dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan Penugasan

Bapperida Kepulauan Selayar pada tahun 2025 tidak mendapatkan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam bentuk tugas pembantuan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah unit kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah merupakan laporan atas penerapan tugas dan fungsi pemerintahan dalam satu tahun anggaran 2025 yang mencakup capaian kinerja penyelenggaraan urusan pilihan sebagai wujud transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif dalam pelaksanaan program/kegiatan dan telah diselenggarakan secara maksimal dengan menggunakan sumberdaya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku

Pencapaian beberapa target pelaksanaan atas tugas pokok dan fungsi Bapperida tidak terlepas dari hasil kerja keras, kreatifitas, komitmen dari seluruh pegawai baik ASN, NON ASN dan stakeholder yang memiliki keterkaitan fungsi sesuai dengan bidang tugas masing-masing dalam rangka pencapaian visi misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Bapperida, dengan harapan semoga keberhasilan senantiasa mengisi segala upaya dari kemajuan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Benteng, Januari 2026

KEPALA BAPPERIDA,

Dr. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. : 19840104 200903 2 003

L A M P I R A N

Lampiran I

Capaian Indikator Kinerja Makro RPJMD kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026, per tanggal 20 Januari 2026 (sumber data BPS Kabupaten Kepulauan Selayar)

Tabel Capaian Indikator Kinerja Makro
RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026

Indikator	Satuan	Capaian Tahun Sebelumnya 2023	2024			Target Akhir RPJMD	Capaian Target Tahun 2024 terhadap Target Akhir RPJMD
			target	Realisasi	Capaian		
IPM	Indeks	71,13	69.00	71,98	95,86	70,00	102,83
Tingkat kemiskinan	%	12,27	10,00	10,79	92,68	9,25	116,65
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,98	2,20	2,05	107,32	1,90	92,68
Pertumbuhan Ekonomi	%	3,67	6.50	na	na	7,50	na
PDRB Perkapita	Juta	na	55,00	na	na	60,00	na
Rasio Gini	Rasio	0,345	0,320	na	na	0,300	na

Instrumen / Data Tambahan EPPD Tahun 2025

No	Aspek Pemerintahan	Rumusan	Elemen Data	Capaian	Keterangan
2	Perencanaan				
a	Jumlah Program yang mendukung 7 Prioritas Nasional Tahun 2024 Berdasarkan Pepres No. 108 Tahun 2022	Program-Program yang mendukung Prioritas Nasional	RKPD Pokok Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025	76 Program Prioritas	Sumber Data : RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025

Benteng, Januari 2025

KEPALA BAPPERIDA,

Dr. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19840104 200903 2 003

Tabel
Matriks Program Prioritas Daerah yang mendukung
Prioritas Nasional Tahun 2025

No	Prioritas Nasional	Prioritas Kabupaten Kepulauan Selayar	Jumlah Program	Ket
1	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1) Program Penguatan Fiskal Daerah	15 Program	
2	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	2) Program Penguatan Pendidikan Gratis PAUD-PT	4 Program	
		3) Program Kesetaraan Gender, PPA, dan Penyandang Disabilitas	3 Program	
3	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	4) Program Pelayanan Kesehatan Gratis dengan BPJS	1 Program	
4	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	5) Program Pemerataan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan dan Penguatan UMKM	3 Program	
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	6) Proram Hilirisasi Sumber Daya Alam Berbasis UMKM	9 Program	
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	7) Program Huluisasi Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru Berbasis Potensi Unggulan Lokal	3 Program	
		8) Program Pengentasan Kemiskinan		
7	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	9) Program Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Bebas RTLH	7 Program	
8	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	10) Program Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi Kreatif, dan Inovasi Daerah	3 Program	
		11) Program Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama dan Pembauran Kebangsaan	3 Program	

9	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	12) Program Kemandirian Pangan	9 Program	
10	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	13) Program Huluisasi Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru Berbasis Potensi Unggulan Lokal		
11	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	14) Program Membangun Desa, Menata Kota	5 Program	
12	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	15) Program Penguatan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	1 Program	
13	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	16) Program Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	10 Program	
	JUMLAH		76 Program	

Tabel diatas menunjukkan keselarasan terkait prioritas Pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan daerah, penjabaran 76 program prioritas Pembangunan daerah terhadap keterkaitan antara 16 Prioritas Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dengan 8 Prioritas Pembangunan nasional dijabarkan sebagai berikut :

Tabel Matriks keterkaitan Sasaran Pembangunan Daerah dengan Program Prioritas Daerah Tahun 2025

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan kehidupan sosial dan keagamaan melalui penerapan nilai budaya dan kearifan lokal								
1	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	1	Program pengelolaan pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	Persen	90,02	100	56.965.140.206	Disdikpora
				Persentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	110,97	100		
				Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persen	94,44	100		
		2	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PPKS dari Data PPKS yang difasilitasi	Persen	40,74	45,50	536.000.000	Dinsos
		3	Program rehabilitasi sosial	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100	100	1.939.000.000	Dinsos
				Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100	100		
				Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100	100		
				Persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh	Persen	100	100		

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab
				rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti					
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesehteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Nafza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Persen	40,54	25,92		
		4	Program penanganan bencana	Persentase Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Persen	100	100	200.500.000	Dinsos
		5	Program pengembangan perumahan	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persen	98	100	638.393.864	DPKP
				Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Persen	-	100		
		6	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Cakupan ketahanan dan diversifikasi pangan	Persen	51,47	54,55	154.423.000	Distan KP
		7	Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	69,42	80,35	5.293.788.200	DP3AP2KB

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab
		8	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk	Angka	36/1000 Penduduk	45/100.000 Penduduk	6.821.500.000	Dinkes
		9	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (SPM)	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	78,34	100	113.873.679.800	Dinkes
				Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	75,88	100		
				Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	79,41	100		
				Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	64,37	100		
				Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	85,90	100		
				Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	100		
				Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	100		
				Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	100		
				Persentase Warga Negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	100		

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab
				Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	Persen	100	100		
				Persentase Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	60,65	100		
				Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	70,85	100		
				Nilai Akreditasi Rumah Sakit	Kategori	Utama	Utama		
2	Maningkatnya Daya Beli Masyarakat	1	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase jenis komoditi yang dipantau	Persen	68,42	100	582.295.300	Disdag KUKM
		2	Program pelayanan izin usaha simpan pinjam	Persentase Koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam	Persen	100	100	10.496.200	Disdag KUKM
3	Meningkatnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial	1	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase Kebijakan Bidang Ketanahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama yang Dirumuskan	Persen	100	100	90.000.000	Kesbangpol
		2	Program pengembangan kebudayaan	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	Persen	0	100	250.000.000	Disparbud
		3	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan	Persen	0	0	357.118.650	Semua Kecamatan

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab
4	Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan	1	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan	Persen	0,39	1	258.923.500	Semua Kecamatan
		2	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase Kebijakan Bidang Ketanahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama yang Dirumuskan	Persen	100	100	90.000.000	Kesbangpol
5	Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	1	Program pembinaan perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	4,50	4,60	317.318.200	DPK
		2	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Peningkatan Prestasi Olahraga (medali)	Medali	67	70	7.195.000.000	Disdikpora
		3	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase penurunan masalah kesehatan masyarakat	Persen	30,19	20	200.000.000	Dinkes
2	Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif								
1	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan	1	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Persentase layanan sistem informasi terkait program kebijakan pemerintah yang berkualitas	Persen	100	100	452.719.050	Diskominfo SP
		2	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase urusan bidang pemerintahan yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	Persen	100	100	2.561.500.000	Setda
				Persentase urusan bidang kesejahteraan rakyat yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	Persen	99,27	100		
		3	Program kepegawaian daerah	Persentase Pemenuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah	Persen	82,16	99,80	772.049.800	BKPSDM

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab
				Persentase ASN yang berkinerja baik	Persen	99,78	100		
		4	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Menit	19,09	10	169.102.700	Semua Kecamatan
		5	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	95	1.000.000.000	Bapperida
		6	Program penyelenggaraan pengawasan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Angka	3,002	3+	4.084.144.341	Inspektorat Daerah
		7	Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	3,68	4,50	135.365.873.000	BPKPD
		8	Program pendaftaran penduduk	Persentase Penerbitan KTP-el	Persen	99,27	100	91.540.000	Disdukcapil
				Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persen	54,08	37		
		9	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum (SPM)	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	95,00	100	828,028.300	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	Persen	100	100		
		10	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Persen	0,90	0,27	359.999.550	DP3AP2KB
		11	Program pengelolaan aplikasi informatika	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara terintegrasi	Persen	100	100	667.796.650	Diskominfo SP

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab
		12	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah	Persen	100	95	700.000.000	Bapperida
		13	Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentasi pemanfaatan hasil kelitbangan dan penerapan inovasi daerah	Persen	100	100	450.000.000	Bapperida
		14	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Program Kerja DPRD yang Trintegrasi dengan Program RPJMD dan RKPD	Persen	100	100	10.327.753.600	Setwan
2	Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	1	Program administrasi pemerintahan desa	Cakupan administrasi pemerintahan desa yang difasilitasi	Persen	100	100	441.000.000	DisPMD
3	Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur berkelanjutan								
1	Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	1	Program penyelenggaraan jalan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	Persen	57,26	74,09	39.194.698.116	DisPUTR
				Proporsi panjang jalan desa yang terbangun	Persen	0	90		
				Tingkat Kemantapan Jembatan Kabupaten	Persen	96,25	99,50		
		2	Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Cakupan Prasarana Pertanian	Persen	100	100	1.416.542.500	Distan KP
2	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	1	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Persentase luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir WS Kewenangan Kabupaten	Persen	100	95	10.054.378.887	DisPUTR

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab
				Persentase Luas Kawasan Permukiman sepanjang Pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten	Persen	100	50		
				Persentase Luas Daerah irigasi kewenangan Kabupaen Kota yang di layani oleh jaringan irigasi	Persen	3,91	1,98		
		2	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPM)	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persen	76	100	5.000.000.000	DisPUTR
		3	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah (SPM)	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	100	100	4.600.000.000	DisPUTR
		4	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	1,03	8,27	3.020.000.000	DPKP
3	Meningkatnya usaha industri, transportasi, dan perdagangan	1	Program pengelolaan pelayaran	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang Layak Fungsi	Persen	1,03	8,27	670.000.000	Dishub
		2	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Kinerja Lalu lintas Kabupaten	Persen	37,92	30,92	295.000.000	Dishub
4	Peningkatan ekonomi desa								
1	Meningkatnya kapasitas SDM dan Fasilitas	1	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	2,63	3,42	617.114.000	Disperin TK

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab
	Perekomian Perdesaan	2	Program penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	Persen	27,55	39,69	206.622.100	Disperin TK
		3	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang Diberdayakan	Persen	55,00	100	700.037.100	Disdag KUKM
		4	Program penyuluhan pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani	Persen	17,14	29,82	36,462.000	Distan KP
		5	Program kawasan permukiman	Persentase penurunan luas kawasan kumuh	Persen	6,32	5,27	1.115.575.983	DPKP
		6	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK K R, dan UPPKS)				881.500.000	DP3AP2KB
				BKB	Persen	29,18	0,74		
				BKR	Persen	2,71	0,61		
				BKL	Persen	40,01	0,62		
				PIK R	Persen	73,03	0,51		
				UPPKS	Persen	43,19	0,91		
2	Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	1	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Cakupan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya	Persen	33,33	33,33	470.000.000	DisPMD
		2	Program peningkatan kerjasama desa	Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa	Persen	8,6	3,46	30.000.000	DisPMD

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab
		3	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	Persen	99,00	100	7.987.652.026	Semua Kecamatan
5	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah								
1	Meningkatnya usaha perikanan	1	Program promosi penanaman modal	Jumlah Investor PMDN/PMA	Investor	1,878	32	130.000.000	DPMPTSP
		2	Program pengelolaan perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	24.962,90	27.519,34	780.926.800	Disper
		3	Program pengelolaan perikanan budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	468,44	1.230,39	419.267.800	Disper
		4	Program perekonomian dan pembangunan	Persentase urusan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	Persen	99,98	100	1.293.635.400	Setda
		5	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Volume Produksi Olahan Hasil Perikanan	Ton	244,91	249,84	1.579.352.413	Disper
		6	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Persentase IKM yang terdaftar pada Sistem Informasi nasional	Persen	0	60	52.481.000	Disperin TK
2	Meningkatnya usaha pariwisata	1	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	3,39	8	400.000.000	Disparbud
		2	Program pemasaran pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	16,41	5	735.000.000	Disparbud

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab
				Persentase peningkatan perjalanan wisatawan Nusantara yang datang ke kabupaten Kepulauan Selayar	Persen	-22,85	10		
			Tingkat huniaan akomodasi	Persen	4,20	10			
		3	Program pengelolaan penerbangan	Persentase rekomendasi izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang diterbitkan	Persen	0	100	0	Dishub
		4	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase SDM/tenaga kerja di sektor pariwisata yang mendapatkan pelatihan	Persen	100	100	300.000.000	Disparbud
		5	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase ketersediaan sarana prasarana perdagangan	Persen	100	100	159.598.000	Disdag KUKM
		6	Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan jumlah komoditi ekspor	Persen	20,58	23,00	240.518.100	Disdag KUKM
		7	Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase IKM yang berkembang modal usaha dan tenaga kerja	Persen	0	20	3.295.953.500	Disperin TK
3	Meningkatnya usaha industri, transportasi, dan perdagangan	1	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	Juta Rupiah	76,286	74,5	584.789.000	DPMPPTSP
		2	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Persentase permintaan data dan informasi yang diterima secara online dan terintegrasi	Persen	100	100	15.000.000	DPMPPTSP
6	Peningkatan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana								

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab
1	Menurunnya tingkat kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran serta meningkatnya mitigasi lingkungan	1	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Pencemaran Status Mutu Air	Angka	2,01	2,59	175.912.600	DLH
		2	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	Presentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persen	1,40	1,38	586.491.000	DLH
		3	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan / atau Kegiatan	Persen	51,20	68	64.537.000	DLH
		4	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Persentase Sarana Prasarana Persampahan	Persen	0	100	0	Dis PUTR
2	Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	5	Program penanggulangan bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100	100	894.500.000	BPBD
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	100		
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100		
		6	Program pengelolaan persampahan	Presentase Pengelolaan Persampahan yang bernilai ekonomi	Persen	1,66	1,30	3.516.725.000	DLH

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab
3	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	7	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran (SPM)	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	275.00.000	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
				Waktu Tanggap (<i>Response Time</i>) Penanganan Kebakaran	Menit	11,84	10,30		

Sumber : Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 28 Tahun 2024, Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025